

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Secara harfiah penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Obor dalam konsep penyuluhan tersebut tetap terus menyalah untuk menerangi berbagai permasalahan masyarakat yang harus di selesaikan sesuai dengan potensi wilayah dan potensi manusianya. Tugas penyuluh pertanian ialah:

- 1) Membantu petani dalam menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan atau perencanaan kedepan;
- 2) Membantu menyadarkan petani terhadap kemungkinan timbulnya analisis tersebut;
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani terhadap suatu masalah serta membantu menyusun kerangka penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang di miliki petani;
- 4) Membantu petani memutuskan pilihan yang tepat menurut pendapat mereka secara optimal
- 5) Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya
- 6) Membantu petani mengevaluasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan (Bahua, 2015).

Sastraatmadja (2018), menyatakan bahwa penyuluhan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan falsafah pendidikan pada umumnya, karena penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya. Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan yang ada lingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih baik secara berkelanjutan (Bahua, 2015).

Mardikanto dan Soebianto (2019), menyatakan bahwa pemberdayaan dalam pendidikan merupakan proses “penyadaran” baik penyadaran tentang keberadaannya, masalah -masalah yang di hadapi, kebutuhan untuk memecahkan masalah, peluang-peluang yang dapat di manfaatkan, serta penyadaran tentang pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri sendiri dan masyarakat.

Falsafah pendidikan mencakup "*idealisme*", "*pragmatisme*" dan "*realisme*" begitu juga dengan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada petani dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani serta membentuk masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita pembangunan nasional penyuluhan pertanian telah membentuk sebuah *idealisme*. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, petani belajar sambil berbuat (*learning by doing*) atau melaksanakan materi penyuluhan. Dengan demikian mencerminkan aliran *pragmatisme* dalam diri petani. Pada saat materi penyuluhan disampaikan banyak petani yang kurang percaya, akan tetapi setelah melihat hasilnya yang kenyataannya memberikan keuntungan, petani akan sadar dan percaya kemudian mencobanya, hal ini mencerminkan *realisme*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber lainnya. Penyuluhan pertanian berupaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi dan efektifitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran petani dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Unsur-unsur penyuluhan pertanian meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penyuluh pertanian, adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan dan pengarahan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, sikap dan perilakunya terhadap perkembangan teknologi
- b. Sasaran penyuluhan pertanian, adalah audiens yang akan diberikan materi penyuluhan
- c. Metode penyuluhan pertanian, adalah cara-cara yang digunakan pada saat dilakukan penyuluhan, yang bersifat mendidik, membimbing, dan

menerapkan sehingga dapat mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku petani agar dapat menolong dirinya sendiri (*self help*)

- a) Media penyuluhan pertanian, adalah saluran yang menghubungkan penyuluh dengan materi penyuluhannya dengan petani yang sedang mengikuti penyuluhan
- b) Materi penyuluhan pertanian, berupa ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang disampaikan pada saat dilakukan penyuluhan
- c) Waktu penyuluhan pertanian, merupakan waktu yang dipilih seorang penyuluh untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada petani
- d) Tempat penyuluhan pertanian, yang artinya adalah tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh petani untuk melangsungkan kegiatan penyuluhan.

2. Tujuan penyuluhan pertanian

Mardikanto (2009), menyatakan bahwa Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan di luar sekolah (non formal), bagi petani dan keluarganya agar berubah Perbaikan usaha dan lingkungan (*better environment*), Perbaikan kelembagaan (*better organization*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*).

- a) Perbaikan kelembagaan (*better organization*) demi terjalinya kerja sama kemitraan antar *stake holders*.
- b) Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*), yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik, yang sangat di perlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan sub-sistem pembangunan masyarakat (*community devel-opment*). Tentang hal ini, pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat berlansung seperti yang di harapkan, makalah petani tidak memiliki cukup dana yang di dukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan di bidang dan sektor kehidupan yang lainnya. Sebaliknya pembangunan pertanian menjadi tidak berarti manakalah memberikan perbaikan kepada kehidupan masyarakatnya
- c) Perbaikan usaha dan lingkungan (*better environment*) demi kelangsungan usaha taninya. Tentang hal ini pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan dan tidak seimbang telah berpengaruh

negatif terhadap produktivitas dan pendapatan petani, secara kerusakan lingkungan hidup yang lain, yang di khawatirkan akan mengancam keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan pertanian itu sendiri.

3. Fungsi Penyuluh Pertanian

Penyuluh berfungsi sebagai mata rantai penghubung antara dua sistem sosial atau lebih. Penyuluh merupakan agen pembaruan dari badan dinas atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan di masyarakat ke arah kemajuan yang lebih baik dengan jalan menyebar luaskan inovasi yang mereka produksi dan miliki serta telah disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ada empat fungsi penyuluhan pertanian yaitu:

- 1) Pembuka jalan bagi petani untuk mendapatkan kebutuhannya di bidang pertanian khususnya ilmu pengetahuan.
- 2) Penyuluhan pertanian merupakan jembatan antara praktek atau kegiatan yang dijalankan petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan senantiasa dibutuhkan oleh petani.
- 3) Penyampai, pengusahaan, dan penyesuaian program nasional dan regional agar dapat dilaksanakan oleh petani dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional
- 4) Kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan masalah-masalah pertanian yang berkembang (Bahua, 2015).

Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan yang dapat memberikan informasi dan pembelajaran kepada petani sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi petani melalui media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perilaku petani. Kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian merupakan aras utama dalam penajaman arah baru pembangunan nasional, seiring dengan agenda reformasi pembangunan pertanian, yaitu pembangunan yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Bahua, 2015).

Penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat mengisyaratkan bahwa petani adalah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar

mereka. Dengan potensi tersebut petani diharapkan mampu mengubah pola berpikirnya ke arah yang lebih baik. Hal ini berarti penyuluhan pertanian dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan kepada petani dan keluarganya. Prinsip pendidikan kepada petani dilakukan melalui pendidikan orang dewasa yang mengedepankan humanisasi, demokrasi, dan pemberdayaan. Prinsip pendidikan orang dewasa ini mengisyaratkan bahwa penyuluhan dan petani merupakan unsur pertama dan terakhir dalam melaksanakan pembangunan pertanian (*extension first and extension last, farmers first and farmers last*) (Bahua, 2015).

4. Peran penyuluh

Terkait dengan peran penyuluh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (UU SP3K) pasal 4 merinci fungsi sistem penyuluh sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan usaha;
- b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif dan menerapkan tata kelola berusaha yang baik serta berkelanjutan;
- e. Membantu menganalisa dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang di hadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
- f. Menumbukan kesadaran pelaku utama dan usaha terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama dan usaha secara berkelanjutan.

Penyuluh pertanian secara teknis dan manajerial dilaksanakan oleh seorang penyuluh yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan informasi dan pendidikan yang di butuhkan petani, sehingga petani dapat lebih baik dalam berusahatani.

Bahua (2016) menyatakan bahwa Penyuluh pertanian memiliki tugas pokok yang perlu di lakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluh yang memiliki kinerja yang baik dapat memposisikan dirinya sebagai motivator, educator, fasilitator dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusaha tani.

- a) Penyuluh sebagai motivator, yaitu selalu berusaha mengembangkan usaha kelompok tani, menggunakan kemudahan teknologi dalam berusaha tani dan membantu petani dalam mengarahkan usahatani.
- b) Penyuluh sebagai educator, yaitu senantiasa meningkatkan pengetahuan petani terhadap ide baru untuk mengembangkan usaha kelompok tani menumbuhkan semangat petani dalam mengelolah usahatani.
- c) Penyuluh sebagai fasilitator, yaitu memberikan jalan keluar/kemudahan baik dalam proses belajar-mengajar maupun memfasilitasi dalam memajukan usahatani. Dalam penyuluhan, penyuluh memfasilitasi tentang: kemitraan usaha, akses pasar dan permodalan.
- d) Dinamisator sebagai yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerja sama dan sebagai unit produksi.

Selain empat point yang di jabarkan, penyuluh juga harus memiliki berbagai kemampuan di antaranya: kemampuan berkomunikasi, pengetahuan yang luas, bersikap mandiri, dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani (Bahua, 2016).

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan mulai dipopulerkan kembali oleh kaum wanita pada tahun 1980-an, setelah sempat dorman pada dekade tahun 1970-an. Pemberdayaan merupakan bagian dari paradigma baru pembangunan masyarakat yang terfokus pada semua aspek manusia dan lingkungannya, yakni mulai dari aspek intelektual, material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Berbagai aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan, dan aspek lingkungan. Makna pemberdayaan menurut kamus Oxford kata *empowers* sinonim dengan memberi daya atau kekuasaan. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu: (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang

memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), dan (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai "*self-empowerment*" atau pemberdayaan sendiri (Bahua, 2015).

Konsep pemberdayaan menjadi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*Kapabilitas*), yaitu: sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Secara konseptual pokok utama pemberdayaan masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan itu seringkali dihubungkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial menekankan bahwa kekuasaan atau kekuatan pola pikir yang dinamis berkaitan erat dengan pengaruh dan kontrol dari seorang pemimpin yang mempunyai niat baik untuk membangun masyarakat secara nyata, konsisten, dan berkelanjutan, kekuasaan tercipta melalui relasi sosial. Oleh karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna kesejahteraan, jika ditinjau dari: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun, dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas, artinya kekuasaan tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis dan berkelanjutan (Bahua, 2015).

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran yang mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi, dari kedua belah pihak yang terlibat, didapat dari (*win win solution*) yang menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup lebih sejahtera bagi, semua masyarakat yang terlibat. Pada tahap ini pemberdayaan masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individu atau kelompok mengubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Basis politik dan hukum yang transparan, serta memberikan ruang gerak bagi demokratisasi dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan implementasi kegiatan.

- b) Peningkatan pertumbuhan, penambahan nilai dan pemerataan administrasi publik yang (*accountability*) dan responsif terhadap penggunaannya.
- c) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melakukan kontrol terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan. Desentralisasi itu sendiri harus mampu bekerjasama dengan mekanisme lain dalam hal ini sistem pemerintahan untuk menggerakkan partisipasi serta pemantauan lembaga pemerintah oleh setiap warga negara.
- d) Menggerakkan kesetaraan pengarus utamaan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kelembagaan politik.
- e) Memerangi hambatan sosial (*social barrier*), terutama yang menyangkut bias-bias etnis, rasial, dan gender dalam penegakan hukum
- f) Mendukung modal sosial yang dimiliki kelompok miskin, terutama dukungan terciptanya jejaring agar mereka keluar dari kemiskinannya. Dalam hubungan ini, lembaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin terhadap organisasi perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik (Bahua, 2015).

6. Bentuk dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus-menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan masyarakat (*strengthening community*) sangat beragam, yang hanya berwujud jika ada kemauan mengubah struktur masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mengentaskan masyarakat dari lembah kemiskinan secara hakiki pekerjaan tersebut sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka. Tugas itu bukanlah pekerjaan mudah yang bersifat *instant* (segera dapat dilihat hasilnya), melainkan harus butuh waktu, perencanaan yang holistik, tenaga dan biaya serta kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan keluarganya. Perencanaan yang holistik

dalam pengentasan kemiskinan diutamakan kearah struktur sosial masyarakat melalui proses partisipasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala aspek yang direncanakan untuk meningkatkan keberdayaan mereka dan terbebas dari kemiskinan (Bahua, 2015).

Pengalaman menunjukkan, bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan seringkali menghadapi kendala-kendala yang sangat besar, antara lain

- a. Usaha-usaha untuk menghambat membela orang-kecil atau orang miskin, yaitu: (a) lemahnya komitmen dan konsistensi (khususnya) aparat pemerintah untuk memihak dan membela orang miskin, (b) rendahnya kepedulian untuk memperhatikan orang miskin, dan (c) Ketidakmampuan memahami kehidupan orang miskin, terutama yang terkait dengan persepsi dan asumsi-asumsi tentang karakteristik orang miskin (Bahua, 2015).
- b. Kendala yang ada di lingkungan orang-miskin, yaitu: (a) kendala fisik alamiah, yang menyangkut kondisi sumber daya alam tempat orang miskin tinggal, seperti: kesuburan lahan, rawan bencana-alam, dan lain-lain, (b) kendala struktural yang bersumber terutama pada struktur social dalam masyarakatnya dan kendala-kultural yang seolah-olah menyerah terhadap nasib, dan (c) kendala sistemik dari kemiskinan, yaitu berlangsungnya suatu pola-pola pengontrolan tertentu terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, yang disadari atau tidak, justru tidak selalu menguntungkan pihak-pihak yang telah berada pada posisi diuntungkan, seperti: kebijakan swasembada pangan (beras), kebijakan pangan murah, prioritas pembangunan perkotaan, pemberdayaan masyarakat perkotaan, pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan dan lain-lain (Bahua, 2015).
- c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bermakna bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian dalam mengatasi masalah yang mereka dihadapi. Upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup

yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau seluruh strata atau lapisan masyarakat (Bahua, 2015).

Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka. Penekanan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ditekankan pada tiga tahapan proses pelaksanaan, yaitu:

- a) Proses pemberdayaan masyarakat yang berupaya memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu dalam masyarakat menjadi lebih berdaya.
- b) Proses memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses musyawarah dan mufakat.
- c) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi sesuai kemampuannya melalui seni dan budaya serta olah raga yang didasarkan pada proses pendidikan yang demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat dapat mengacu pada berbagai kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran adanya kekuatan sosial yang menekan atau mendorong orang lain pada aksi-aksi sosial untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Jenis pemberdayaan dari segi penguatan dapat dilihat pada dua level, yaitu: individu dan komunitas. Pada level individual, isu-isu yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat adalah hubungan patron-klien, gender, akses ke pemerintahan (negara), dan sumber-sumber kepemilikan properti. Sementara pada level komunitas, isu-isu utama yang biasa di angkat adalah: mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*), pemberdayaan atau penguatan kerangka institusional dan akses hubungan dengan badan-badan pemerintah (Bahua, 2015).

Pembangunan sosial pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat. Bagi seorang pelaku perubahan, hal yang dapat dilakukan terhadap klien mereka (baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok atau komunitas) adalah upaya untuk memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Terdapat 3 tahapan dalam pemberdayaan, yaitu:

a) Tahapan Politik

Pemberdayaan secara perlahan melekat sebagai mekanisme bantuan diri untuk manusia lain-*mechanism of self-help for people*. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan diganti dengan ketergantungan pada diri sendiri secara nasional, dalam sistem ekonomi, pendidikan, kebudayaan, efisiensi dan efektivitas, sumber daya dan persaingan.

b) Tahapan Organisasi

Tahapan organisasi merupakan salah satu konsep pemberdayaan yang mengedepankan potensi sumber daya organisasi dengan berbagai sistem dan metode dinamika kelompok yang dinamis. Konsep modern yang mendorong organisasi, seperti *total quality management, habitual improvement, performance management, self-directed team work, internal customers, competence management etc.* Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan tergantung pada nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi.

c) Tahapan Sumberdaya Manusia Individual

Pada tingkat atau tahapan individual, perubahan dari sumberdaya manusia yang sebelumnya kurang percaya diri selalu penurut dan patuh serta dikendalikan oleh kekuasaan, ketrampilan, status dan bayangan pribadi, meningkat kepada hal-hal dan imbalan yang lebih besar. Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap sumberdaya manusia, baik yang memerlukan waktu singkat, maupun waktu yang lama, menjadikan perubahan hidup dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang semula dianggap tidak mungkin.

7. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan

kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (*income generating*). Hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan, kekuasaan dan keberanian, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mandiri demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik dan mental secara berkelanjutan. Mandiri bukan berarti menolak bantuan pihak luar, tetapi kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Keadaan sumber daya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.
- b. Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai.
- e. Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun temurun (Bahua, 2015).

Mardikanto dan Soebiato (2019), menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan berikut:

- a) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus di rancang sebagai yang di lakukan suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;
- b) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan perbaiki aksesibilitasnya, utama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran;
- c) Perbaikan tindakan (*better action*) dengan bekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, di harapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

- d) Perbaiki kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan /tindakan yang dilakukan, di harapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
- e) Perbaiki usaha (*better bussines*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang di lakukan;
- f) Perbaiki pendapatan (*better income*) dengan terjadinya bisnis yang dilakukan di harapkan akan memperbaiki pendapatan yang di perolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
- g) Perbaiki lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan social), karena kerusakan lingkungan seringkali di sebabkan oleh kemiskinan atau pendapatn yang terbatas;
- h) Perbaiki kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- i) Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaaan kehidupan yang lebih baik, di harapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sebagai upaya mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, banyak upaya yang dapat dilakukan. Tetapi untuk mewujudkan ide menjadi aksi mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ide aksi tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai model pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai subyek dan pelaku dari suatu pembangunan masyarakat yang dapat menopang kehidupan masyarakat itu sendiri (Bahua, 2015).

8. Model - Model Pemberdayaan

Model pemberdayaan masyarakat yang diciptakan melalui ide aksisosil memerlukan suatu motivasi dan kemandirian serta berbagai sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber dana serta regulasi yang efektif dan efisien serta berpihak pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai ketidakkonsistenan dan

ketidakpastian kebijakan yang lain (*inconsistency and uncertainty policy*), baik karena perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan, tekanan ekonomi, maupun perubahan kondisi sosial-politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada peningkatan pendapatan masyarakat (*income generating community*). Tetapi juga diperlukan advokasi hukum dan kebijakan bahkan pendidikan politik yang santun dan berwibawa untuk penguatan daya tawar politik yang rasional dari masyarakat (Bahua, 2015).

Model-model kebijakan yang menonjolkan pemberdayaan Salah satu model kebijakan yang menonjolkan konsep pemberdayaan adalah model demokrasi ekonomi. Model ini mempunyai nama lain yang beragam mulai dari ekonomi rakyat, perekonomian rakyat, ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan dan sejenisnya. Peran kaum intelektual dalam mengakkan demokrasi ekonomi adalah pilihan. Artinya, dalam perubahan situasi ekonomi dunia yang semakin tidak memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang berkemampuan ekonomi lemah dan tidak mampu, kaum intelektual dipanggil untuk melakukan upaya pembelaan kepada masyarakatnya yang masih lemah (Whiratnolo dan Dwidjowijoto, 2007). Adapun upaya yang di lakukan dalam pemberdayaan ialah:

1) Upaya pemberian kesempatan

Upaya yang di lakukan kepada masyarakat adalah secara sengaja dan terukur. Artinya terdapat strategi, mekanisme, dan tahapan yang di susun secara sistematis untuk memberdayakan kelompok masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu (*work Bank dan UNDP dalam whiratnolo dan dwidjowijoto, 2007*).

2) Upaya pemihakan

Upaya pemberdayaan yang di lakukan dengan pemberian kesempatan. Upaya pemihakan utamanya di lakukan dengan cara-cara menciptakan iklim kondusif untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi (*enabling*) dan mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan mengakses asset produktif dan kesediaan asset produktif yang ada (Whiratnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

3) Upaya perlindungan

Pemberdayaan adalah perlindungan yang lemah. Melindungi yang lemah di perlukan akibat penguasaan aset produksi yang tidak menguasai atau mempunyai sekalipun aset produktif (Whiratnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

9. Kelompok Tani

Kelompok adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktifitas umum namun dengan arah interaksi terkecil. Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Secara umum, kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani yang tidak bisa diatasi secara individu, kelompok tani dapat dibentuk secara swadaya maupun atas dasar kepentingan kebijakan dari pemerintah melalui Dinas Pertanian. Secara teoritis kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kepentingan bersama dalam usaha tani (Wiranti dalam Khasanah, 2018).

Kelompok tani adalah suatu sistem sosial (*sosial system*) yang hidup dalam lingkungan sosial di antara beragam jenis sosial lainnya, baik berupa lembaga pelayanan (pemerintah), lembaga pendukung (lembaga desa), maupun kelembagaan ekonomi (pedagang, pasar dan lain-lain), dan bahkan lembaga pesaing (misalnya kelompok tani) yang memasok produk serupa asal yang sama. Dengan demikian, struktur lingkungan sosial serta bagaimana kelompok tani bersikap terhadap lingkungan, apakah memilih pada posisi “dikuasai” atau “menguasai” akan sangat menentukan kemampuan daya saingnya (Amrin Zakaria, 2010).

Pembinaan kelembagaan petani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha tani. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan

memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Kegiatan ini merupakan upaya membentuk kemandirian kelompok tani sebagai wadah petani dalam melakukan aktivitasnya. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016.

Permentan nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tersirat bahwa penguatan kelompok tani diharapkan mampu meregenerasi petani melalui meningkatnya motivasi, minat dan aksi generasi muda pada bidang pertanian. Regenerasi petani melalui meningkatnya motivasi, minat dan aksi generasi muda pada bidang pertanian. Regenerasi petani sangat penting dilakukan mengingat jumlah petani yang semakin menurun. Menurut Purwanto *dalam* Yudia Anggun (2018) menyatakan bahwa kelompok petani dapat didefinisikan sebagai kumpulan petani yang terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Menurut Anggun (2018), Cepat lambatnya proses adopsi dalam diri individu berbeda-beda perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi cepat lambatnya proses adopsi antara lain: Umur, Pendidikan, Status ekonomi sosial, Pola hubungan, Keberanian mengambil resiko, Sikap terhadap perubahan, Motivasi, Aspirasi, *Fatalisme* dan *Diagnostisme*.

10. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani terbentuk atas kesadaran, atau tidak dipaksa. Kelompok tani ini menghendaki terwujudnya pertanian yang baik, usahatani yang optimal dan keluarga tani yang sejahtera dalam perkembangan hidupnya. Para anggota terbina agar berpandangan sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan. Kelompok tani memiliki fungsi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengadaan sarana produksi murah dengan cara melakukan pembelian secara bersama.
- b) Pengadaan bibit yang resisten untuk memenuhi kepentingan para anggotanya.
- c) Mengusahakan kegiatan pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.

- d) Guna kepentingan bersama berusaha memperbaiki prasarana-prasarana yang menunjang usahatani.
- e) Guna memantapkan cara bertani dengan menyelenggarakan demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama yang dilakukan bersama penyuluh.
- f) Mengadakan pengolahan hasil secara bersama agar terwujudnya kualitas yang baik, beragam dan mengusahakan pemasaran
- g) Kelompok Tani berperan dan berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi usaha tani, dan wahana kerjasama antara anggota kelompok.

UU Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kelas Belajar

Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.

2. Wahana Kerjasama

Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Sebagai wahana kerjasama, kelompok tani diharapkan agar dapat menjadikan usahatani menjadi lebih efisien, lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan.

3. Unit Produksi

Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Kelompok tani dikatakan berkembang atau pun berdaya apabila memiliki karakteristik yang berciri sebagai berikut : a) saling mengenal satu dengan yang lain, akrab dan saling percaya antara sesama anggota, b) mempunyai tujuan atau pandangan yang sama, c) memiliki kesamaan dalam tradisi, atau pemukiman dalam berusaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan

dan ekologi, d) ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama (Deptan 2007).

10. Kelompok Wanita Tani

Menurut Nurmayasari dan Ilyas (2016), menyatakan bahwa wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi pendapatan dalam keluarga pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka. Kenyataannya sekitar 50 persen wanita tani di samping bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja di ladang atau di sawah bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti kelompok wanita tani. Hal ini dilakukan karena mereka berharap dengan adanya peran atau keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas usaha akan meningkat dan perekonomian dalam keluarga dapat terpenuhi.

Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok wanita tani, merupakan salah satu bentuk kelembagaan bagi petani, anggotanya terdiri dari para wanita-wanita petani yang melakukan kegiatan pertanian yang terlibat tetap atau sewaktu waktu dalam kegiatan usahatani baik secara langsung atau tidak langsung dan memiliki kesibukan lainnya berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan keluarga tani. Kelompok wanita tani berbeda dengan kelompok tani yang lainnya karena kelompok wanita tani diarahkan untuk dapat menambah penghasilan keluarga dengan cara mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga dengan memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian maupun perikanan. Untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok wanita tani maka diperlukanlah suatu inovasi.

Menurut Clemen *et al.*, (2019), menyatakan bahwa pemberdayaan kelompok wanita tani merupakan upaya mengoptimalkan dan membangkitkan daerah yang miskin, dengan mendampingi wanita tani untuk peningkatan potensi melalui pengembangan usaha yang produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok melalui ketahanan pangan.

Kegiatan pemberdayaan wanita tani memerlukan proses yang cukup lama karena hasil dari pemberdayaan yang baik tidak dapat langsung terlihat, sehingga untuk mewujudkan strategi pemberdayaan wanita tani yang telah dirumuskan diperlukan tahapan tahapan dalam pelaksanaannya hal ini sesuai dengan

pernyataan, bahwa dalam pemberdayaan diperlukan langkah-langkah lebih kongkret agar tidak hanya tercipta suasana namun memiliki akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat wanita tani semakin berdaya (Minarni *et al.*, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

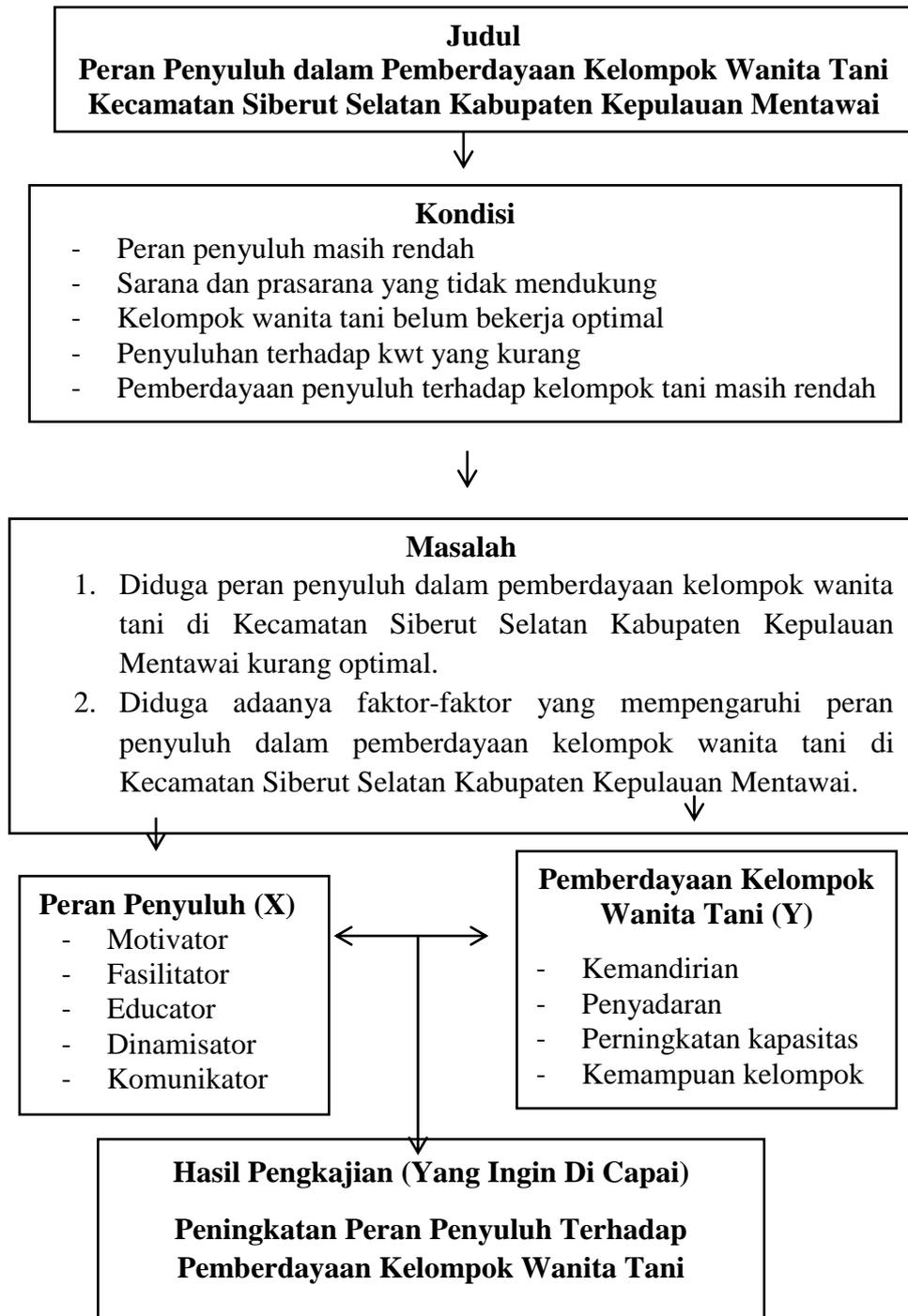
Pengkajian terdahulu merupakan suatu penelitian yang memiliki kaitan yang relevan dengan pengkajian ini. Tujuan dari pengkajian terlebih dahulu yaitu untuk memperjelas deskriptif variabel-variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan sebelumnya serta mengkaji serupa yang pernah dilakukan.

1. Tinambunan, R M, L (2018) dengan judul Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. Data yang di peroleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian kabupaten dairi tergolong sangat berpengaruh pada kinerja penyuluh. Adapun poin-poin yang mempengaruhi peran dari penyuluh sebagai edukasi, fasilitasi, konsultan supervise dan evaluasi. Hal ini penyuluh harus lebih meningkatkan tupoksinya sebagaimana mestinya.
2. Junita, R (2015) dengan judul Peran Penyuluhan dalam Pemberdayaan Petani Karet Pola Swadaya Di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dapat di simpulkan bahwa peran penyuluhan di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar sudah “Cukup Berperan karena sudah menjalankan tugasnya sebagai penyuluh dengan baik yang dimana di ketahui beberapa perannya sebagai penyuluh ialah memotivasi, sebagai konsultan, pendidik dalam lainnya.
3. Muspitasari, D dkk (2017) dengan judul Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data dalam penelitiannya dengan data primer, yang dimana di data tersebut di peroleh hasil dari wawancara dengan penyuluh dan responden yang berfungsi untuk mengetahui kinerja

penyuluhan responden petani terhadap program penyuluhan. Metode analisis dengan deskriptif dan regresi linear berganda. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan berpengaruh signifikan pada variabel utusan/wakil dan teknikal, hal ini terlihat pada variabel pendidik dan fasilitator.

C. Kerangka pikir

Sugiyono (2018), menyatakan bahwa kerangka pikir merupakan sebuah sintesa mengenai hubungan antar variabel yang telah dideskripsikan berdasarkan berbagai teori. Kerangka pikir bertujuan sebagai pondasi pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan kegiatan penelitian atau pengkajian yang akan dilakukan. Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah di dalam pengarahannya penugasan akhir. Kerangka pikiran dari pengkajian peran penyuluh dalam pemberdayaan kelompok wanita tani di Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dapat dilihat pada gambar.1



Gambar 1. Kerangka pikir